



Sistem, Mekanisme dan Permasalahan Pemeriksaan Keuangan di Indonesia

Muhammad Syahratul Ikhsan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jambi

icanneko@gmail.com

M. Khairun Najmi Ali

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jambi

mkhairunnajmiali01@gmail.com

Ratih Kusumastuti

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jambi

ratihkusumastuti@unja.ac.id

Alamat: Jl.Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec.Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Abstract. *The Supreme Audit Agency (BPK) is a government organization responsible for examining how the government spends its money. BPK is headquartered in the national capital and has representatives in every province. The responsibilities of BPK's audits include financial audits, performance audits, and audits with specific objectives. Financial audits cover the state's revenue and expenditure, as well as regional revenue and expenditure. The high level of corruption in Indonesia has led to some individuals becoming wealthy while others struggle. The causes of corruption also include the misuse of government funds by both the central and regional governments. BPK is responsible for ensuring that public institutions are run ethically and effectively. It oversees corruption by investigating and taking action against those responsible*

Keywords: *BPK, Financial Issues, Corruption*

Abstrak. BPK adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memeriksa bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya. BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tanggung jawab pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan khusus. Keuangan negara meliputi pendapatan dan belanja negara serta pendapatan dan belanja daerah. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia membuat banyak orang menjadi kaya sementara penduduk lainnya berjuang. Penyebab korupsi juga karena penyalahgunaan dana pemerintah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga publik dijalankan secara etis dan efektif. BPK mengawasi korupsi dengan menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: BPK, Permasalahan Keuangan, Korupsi

PENDAHULUAN

BPK adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memeriksa bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya. BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tanggung jawab pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan khusus.¹

Kuangan negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang ini mencakup segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab negara, termasuk nilai keuangan dan segala sesuatu yang dapat dibeli dengan uang yang berkaitan dengan nilai tersebut. Dalam hal desentralisasi pemerintah, penting untuk memastikan bahwa uang untuk membayar proyek tersedia. Tujuan desentralisasi adalah memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah.²

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa sektor keuangan daerah merupakan sumber utama kerugian terkait korupsi bagi pemerintah Indonesia. Penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan tidak selalu disengaja. Kadang-kadang karena kelemahan atau ketidaktahuan organisasi di pihak karyawan, melaporkan dan mendokumentasikan kelemahan adalah bagian penting dari proses perencanaan dan pelaksanaan proyek yang berhasil. Salah satu penyebab tidak berjalannya pengelolaan keuangan negara dengan baik adalah kurangnya pengawasan terhadap apa yang terjadi.³

PEMBAHASAN

UU Keuangan Negara adalah dokumen yang menjelaskan aturan pokok yang terdapat dalam UUD. Ini penting karena membantu memastikan bahwa Konstitusi dipatuhi. Hal tersebut meliputi prinsip-prinsip yang telah digunakan dalam pengelolaan keuangan selama bertahun-tahun juga digunakan untuk mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya. Ada juga prinsip-prinsip baru yang dipraktikkan sebagai hasil dari praktik terbaik yang terbukti berhasil.⁴

¹ Abdul Latif, (2002)

² Adrian Sutedi, (2012)

³ Arief Amrullah, (2004).

⁴ Hermansyah, (2011)

BPK bertanggung jawab untuk memantau keuangan pemerintah dan memastikan bahwa setiap kekhawatiran tentang keuangan negara ditangani. Mereka juga akan bekerja sama dengan entitas yang diaudit untuk memastikan bahwa temuan audit diikuti.⁵

BPK berwenang mengambil keputusan tentang banyak hal yang berkaitan dengan konstitusi. Konstitusi mengakui peran penting BPK dalam mengawasi keuangan negara, dan memungkinkan perubahan fungsi pemeriksaan untuk memastikan bahwa BPK melakukan tugasnya secara efektif.⁶ Tugas BPK untuk memeriksa keuangan negara menjadi lebih sulit karena perubahan yang terjadi belakangan ini. Jika fungsi pemeriksaan keuangan negara terlalu luas, maka akan kurang mampu melacak berapa banyak uang yang dibelanjakan dan ke mana perginya, yang dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius. Sistem keuangan negara mengalami disorientasi karena konstitusi.⁷

Pemerintah Indonesia bekerja keras untuk mencegah dan menghentikan korupsi. Termasuk mengusut dan menindak pelaku tindak pidana korupsi. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertama kali disahkan pada tahun 1999. Kemudian dilakukan amandemen pada tahun 2001. Kemudian, pada tahun 2009, undang-undang baru disahkan untuk membantu penegakan upaya antikorupsi.⁸

BPK bertanggung jawab untuk memeriksa keuangan negara. Ini membantu mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas. Bagian pertama dari pemeriksaan BPK dirancang untuk meningkatkan kualitas produk. Ini termasuk pemeriksaan umum semua produk. Kelompok kedua adalah verifikasi dengan tujuan tertentu, ditujukan untuk mendeteksi keberadaannya korupsi melalui pemeriksaan dan pemeriksaan investigasi khusus (pemeriksaan investigasi-pencarian). BPK membantu mencegah kejahatan dengan mencegah korupsi.⁹

Pemeriksaan adalah suatu proses yang membantu kita untuk memeriksa apakah hal-hal yang kita periksa dalam rencana pemeriksaan kita masih dalam keadaan baik. Undang-undang mengatakan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan, pemerintah

⁵ Yopie Morya Immanuel Patiro, (2012).

⁶ (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2012: 273).

⁷ Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, Jakarta: Biro Penelitian dan Pengembangan BPK RI.

⁸ Sutan Remy Sjahdeni, (2007)

⁹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2016).

dapat mengambil sebagian uang atau harta benda mereka. Ini disebut "kehilangan elemen kriminal". Dan jika pemerintah menganggap bahwa suatu perusahaan atau organisasi telah menyebabkan atau menyebabkan "kerugian negara", itu juga dapat merampas uang atau harta benda mereka.¹⁰

Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, kita perlu memperbaiki sistem akuntansi dan hukum. Ini akan membantu memastikan bahwa perusahaan melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan bahwa uang dibelanjakan dengan bijak. Selain itu, kita perlu bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya (seperti kepolisian dan kejaksaan) untuk mengetahui di mana kerugian keuangan negara terjadi.¹¹

KESIMPULAN

BPK adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memeriksa bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya. BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tanggung jawab pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan khusus.

Kerja penting BPK dalam pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika tidak ada kerjasama dengan pelaku penting lainnya, seperti aparat penegak hukum. KPK bertanggung jawab untuk mencegah korupsi dan membantu menangkap orang-orang yang terlibat dalam transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini sangat penting dalam membantu mengadili orang yang melakukan tindak pidana sedangkan BPK membantu membuat sektor publik dan bisnis lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif, (2002). Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Prenada Media Group.

Adrian Sutedi, (2012). Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika

Arief Amrullah, (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang, Money Laundering, Malang: Bayumedia Publishing.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2016).

¹⁰ Harnold Ferry Makawimbang, (2015)

¹¹ Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2012).

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, Jakarta: Biro Penelitian dan Pengembangan BPK RI.
- Harnold Ferry Makawimbang, (2015). Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Yogyakarta: Thafa Media bekerja sama dengan Pusat Studi dan Analisis Pencegahan Kerugian Keuangan Negara (PSA PKKN).
- Hermansyah, (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Sutan Remy Sjahdeni, (2007). Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- W. Ryawan Tjandra, (2014). Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yopie Morya Immanuel Patiro, (2012). Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Keni Media.
- Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2012). Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.